

KINERJA PENDAMPING SOSIAL PADA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN DAN KELOMPOK RENTAN DI KOTA TARAKAN

SOCIAL FACILITATOR PERFORMANCE ON PROGRAM OF POVERTY ALLEVIATION AND VULNERABLE PEOPLE IN TARAKAN CITY

Suradi dan B Mujiyadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 31 Mei 2018; Direvisi: 31 Juli 2018; Disetujui: 8 Agustus 2018

Abstrak

Pendamping sosial memiliki posisi penting dan menentukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan karena itu kinerja pendamping sosial merupakan unsur yang fundamental. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan. Data dikumpulkan dari pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Kelompok Penerima Manfaat; dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan tugas dan peranannya, dan sudah mengembangkan jejaring kerja dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, kinerja pendamping sosial masih pada kategori *moderate*, sehingga masih memerlukan upaya optimalisasi.

Kata kunci: *pendampingan sosial, kinerja pendamping sosial, kemiskinan, kelompok rentan*

Abstract

Social facilitator has had an important and determine position in the implementation of social development. This study has aimed to describe social facilitator performance on facilitating social development program, epecially on poverty alleviation and vulnerable people in Tarakan Municipal area. Data has been collected through interviewing varies figures such as social facilitators, social staffs of Social Municipality, Social Care Institution, and crosschecked through interview for beneficiaries. Beyond those interviews, data has also collected through focus group discussion and documentary study. The result of study shows that social facilitators have already done by varies roles and activities and has developed a network to overcome the problems faced. However, the social faciliator performance is still in the moderate category, so the facilitator could be optimized of their performance by varies training activities for capacity building and facilitated by adequate tools on accessing their works.

Keywords: *social facilitating, social facilitator performance, poverty, vulnerable people*

PENDAHULUAN

Program kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam usaha membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang beruntung. Kementerian Sosial RI menggunakan istilah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) pada masyarakat kurang beruntung yang ditetapkan sebagai penerima program. Karakteristik umum KPM adalah mereka yang mengalami keterbatasan secara sosial, ekonomi, intelektual dan emosional. Perbedaan persepsi pada KPM tersebut menyebabkan mereka kesulitan untuk memahami dengan baik maksud dan tujuan program kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan pendampingan sosial pada program-program kesejahteraan sosial (Ningrum, 2017; Wulandari, 2017; Hendrikus, 2016; Huda, Anggraini dan Sutyono, 2013).

Kementerian Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. Pada Permensos tersebut disebutkan, bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial dibedakan menjadi: Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Pendamping sosial adalah salah satu TKS dari unsur masyarakat (lihat PP No 39/2012; Permensos No 16/2017).

Pengertian pendamping sosial pada setiap program dalam rumusan yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, secara umum pendamping sosial adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kapasitas tertentu, serta menerima tugas untuk melakukan pendampingan sosial pada program-program Kementerian Sosial (lihat Susantyo, 2016).

Adapun tugas pendamping sosial adalah memfasilitasi akses kepada sistem

layanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, permodalan dan layanan sosial lainnya; meningkatkan kapasitas KPM terkiat dengan perubahan perilaku, pola pikir dan komitmen; melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar (lihat Susantyo, 2016).

Pendamping sosial tersebar pada 14 program kesejahteraan sosial, yang antara lain pada: Program Keluarga Harapan, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Asistensi Sosial Lanjut Usia, Program Kesejahteraan Sosial Anak, dan Program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (Permensos No 16/2017).

Pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan memiliki peran yang sangat strategis. Mereka memainkan berbagai peranan penting yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Kelompok Penerima Manfaat (KPM), sehingga mereka berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka. Oleh karena itu, kehadiran pendamping sosial sangat ditunggu-tunggu oleh KPM (Susantyo, et.al, 2018; Rahmawati, 2017; Rohman, 2017; Irmayani.et.al, 2016; Zuhri, 2014; Widyakusuma, 2013).

Pada sisi lain, pendamping sosial masih menghadapi berbagai permasalahan ketika melaksanakan pendampingan. Permasalahan dimaksud, terkait dengan jumlah, penempatan, fasilitas pendukung (Irmayani, 2016); kegiatan pemutakhiran data KPM (Rahmawati, 2017; Zuhri, 2014); terbatasnya sarana prasarana (Susantyo.et.al, 2018; Rohman, 2017); dan jumlah honor yang diterima belum layak, belum meratanya kesempatan pendidikan dan pelatihan (Widyakusuma, 2013). Permasalahan tersebut memerlukan solusi segera, agar pendamping sosial mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Penelitian yang membahas kinerja pendamping sosial sudah banyak dilakukan, dan dapat diakses pada publikasi nasional (Suryani dan Purnama, 2017; Widyakusuma, 2013; Alamin, 2010). Namun demikian, sebagian besar locus penelitian tersebut masih terbatas pada tingkat lokal atau di kabupaten/kota tertentu; dan sepengetahuan peneliti di Kota Tarakan belum dilakukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian dengan mengangkat permasalahan kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan ini penting untuk dilaksanakan.

Kinerja didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang ditampilkan pada saat melaksanakan pekerjaan (Jex in Berghe, 2011); dan hasil kerja seseorang (Hersen in Berghe, 2011); serta komitmen untuk melaksanakan pekerjaan (Fogaca, et al, 2018). Kinerja ini didasarkan pada tahapan tindakan logis, dimulai dengan niat dan terus sampai pada hasil yang dicapai (Bourguignon in Dobrin, et al, 2012).

Menurut Campbell (Koopmans, 2011), ada delapan dimensi kinerja: (1) kemampuan melaksanakan tugas tugas spesifik, (2) kemampuan melaksanakan tugas non-spesifik, (3) komunikasi tertulis dan lisan, (4) menunjukkan usaha, (5) mempertahankan disiplin pribadi, (6) memfasilitasi kinerja rekan dan tim, (7) pengawasan, dan (8) manajemen dan administrasi.

Mengingat luasnya ruang lingkup kinerja pendamping sosial, maka pada penelitian ini, difokuskan pada bagaimana kegiatan dan peran, jaringan kerja/kemitraan dan permasalahan dalam pendampingan sosial.

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kinerja pendamping sosial pada

penerapan program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan dengan teknik penulisan deskripsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis, dalam meningkatkan kinerja pendamping pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan teknik penulisan deskriptif. Penelitian dilakukan dalam upaya Menggambarkan secara mendalam dengan teknik penulisan Pada penelitian ini, pendamping sosial tidak dilihat secara khusus pada *setting* program, dan oleh karena itu pembahasan penelitian berlaku untuk semua pendamping sosial yang menjadi subyek penelitian.

Penelitian dilaksanakan tahun 2018. Pada penelitian ini diwawancarai 10 orang pendamping sosial dari 5 (lima) program kesejahteraan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 4 orang, Penanganan Fakir Miskin (PFM) sebanyak 1 orang, Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) sebanyak 2 orang, Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 2 orang, dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacaaan (ASODK) sebanyak 1 orang. Profil pendamping tersebut akan dideskripsikan pada pembahasan selanjutnya. Penetapan informan didasarkan pada data yang tersedia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan pertimbangan mereka melakukan pendampingan secara aktif pada 12 bulan terakhir.

Selain pendamping sosial, wawancara dilakukan pula dengan unsur instansi sosial Kota Tarakan selaku pembina fungsional pendamping sosial. Untuk mendalami informasi

terkait dengan pendampingan sosial, dilakukan diskusi kelompok terarah dengan pendamping sosial, unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos dan PM) Kota Tarakan, LKS dan KPM. Peneliti juga melakukan studi doku mentasi dengan mempelajari laporan tertulis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, maupun laporan yang dibuat oleh pendamping sosial. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan t menggambarkan kinerja pendamping sosial.

Informasi yang dihimpun dari lapangan dikompilasi, dan dikategorisasi berdasarkan tujuan penelitian, dan sumber data. Kategorisasi data mencakup: karakteristik pendamping sosial, kegiatan/kinerja dan peran pendamping, jaringan kerja / kemitraan dalam pendampingan sosial dan permasalahan dalam pendampingan. Keempat komponen tersebut akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Kota Tarakan

Kota Tarakan adalah sebuah kota di Kalimantan Utara, dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara, sekaligus kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km². Kota Tarakan terpisah dari daratan Kalimantan, sehingga menyebabkan biaya logistik ke kota ini relatif mahal karena menggunakan sarana transportasi air. Kota Tarakan secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Pantai Kec. P. Bunyu, selatan dengan Pesisir Panti Kec. Tanjanung Palas, barat dengan Pesisir panti Kec. Sesayap dan timur dengan Kec. Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi. Kota ini dihuni penduduk sebanyak 641.936 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 340.811 jiwa dan perempuan berjumlah 301.125 jiwa (BPS Kota Tarakan, 2015).

Penduduk asli Kota Tarakan adalah suku asli Tidung. Dalam perkembangannya Kota Tarakan dihuni pula oleh suku-suku lain seperti, Suku Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Tionghoa, dan lain-lain. Pemeluk agama terbesar adalah Islam disamping Kristen Protestan, Budha, Katolik dan Hindu. Masyarakat dengan berbagai macam suku dengan berbagai agama yang dianut tersebut hidup rukun dan saling menghormati. Ketika terjadi konflik sosial antara mereka, dapat diselesaikan secara damai (BPS Kota Tarakan, 2015).

Permasalahan sosial yang dihadapi Kota Tarakan adalah kemiskinan sebesar 5,17 persen atau berkisar 3.318.809 jiwa; angka pengguran sebesar 7.09 persen, rata-rata lama sekolah 9.50 tahun. Fenoma yang menarik, bahwa angka harapan hidup penduduk Kota Tarakan termasuk kategori tinggi, yaitu 72,19 tahun (BPS Kota Tarakan, 2015).

2. Karakteristik Pendamping Sosial

Pengenalan sosok pendamping dilihat dari pendidikan, pengalaman kerja dan bimbingan teknis (bintek) yang pernah diikuti, asal daerah, awal menjadi pendamping, insentif dan honorarium, peralatan kerja. Komponen-komponen tersebut dipandang perlu untuk dilihat, karena berkaitan langsung dan menentukan pelaksanaan pendampingan.

Pendidikan pendamping sosial termasuk kategori tinggi. Dari 10 orang pendamping sosial, sebagian besar (8 orang) berpendidikan sarjana, dan dua orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka yang pendidikan sarjana dari berbagai jurusan, yaitu tiga orang jurusan ekonomi, dan masing-masing satu orang jurusan psikologi, agama islam, apoteker, pendidikan dan

bahasa Inggris. Data ini menggambarkan, bahwa pendidikan pendamping sosial dapat dikatakan kategori tinggi.

Pendidikan mengarah pada kapasitas keilmuan seseorang, dan kemampuannya dalam memahami masalah dan menemukan solusi. Seorang pendamping dengan pendidikan tinggi, mereka akan mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, atau berkinerja baik karena memiliki kapasitas keilmuan.

Pelatihan (termasuk bintek) dan atau bimbingan merupakan modal penting bagi pelaksanaan pendampingan. Sebanyak lima orang pernah mengikuti satu kali, empat orang mengikuti dua kali dan satu orang mengikuti tiga kali. Pelatihan atau binteks merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pendamping sosial, baik administratif maupun teknis dalam melakukan pendampingan. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan yang dikuasai, maka semestinya mereka akan lebih mampu melaksanakan tugas atau berkinerja lebih baik.

Proses bekerja sambil belajar antar mereka, dan bimbingan secara informal dari instansi sosial provinsi maupun kota, telah memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial.

Dari sisi asal daerah, enam orang berasal dari Tarakan, dan empat orang berasal dari luar Kota Tarakan (Jawa Timur dua orang, Sulawesi Selatan satu orang dan Jawa Tengah satu orang). Bagi pendamping yang berasal dari luar Kota Tarakan, mereka sudah lebih dua tahun tinggal di Kota Tarakan, sehingga sudah beradaptasi dengan kultur dan situasi masyarakat di Kota Tarakan. Selain itu, selama di Kota Tarakan mereka lebih dua

tahun terlibat dalam kegiatan pendamping sosial.

Pendamping sosial sebagai pekerja masyarakat (*community worker*), akan melaksanakan tugas dan perannya atau berkinerja dengan baik apabila memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang didampingi. Kepercayaan ini tidak lepas dari pemahaman yang sama terhadap kultur, nilai dan norma yang berlaku. Pendamping sosial dari orang setempat, mereka tidak mengalami kesulitan untuk memahami kultur, nilai dan norma masyarakat, sehingga akan lebih memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas dan peranannya.

Pengalaman menjadi pendamping sosial akan ikut mewarnai dan memengaruhi pelaksanaan pendampingan sosial. Sebanyak tiga orang menjadi pendamping sosial kurang dari dua tahun, dan tujuh orang berpengalaman lebih dari tiga tahun. Pengalaman kerja ini tentu sudah banyak memberikan pengetahuan bagi pendamping sosial; sehingga mereka dapat menjelaskan pengalamannya dengan baik, dan memberikan informasi secara obyektif.

Pendamping sosial telah memiliki pengalaman bekerja/aktivitas di bidang kesejahteraan dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kaltara dan Dinsos dan PM Kota Tarakan lebih dari dua kali. Selain bekerja bersama instansi tersebut, proses bekerja sambil belajar antar mereka, telah memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial.

Seringkali teori yang dipelajari tidak sesuai dengan realitas sosial di masyarakat. Kelemahan ini dapat diatasi ketika seorang pendamping sosial memiliki pengalaman di bidang yang relatif sama dengan tugas dan perannya saat ini. Dengan pengalaman yang

dimiliki, maka seorang pendamping sosial memiliki modal yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan peranannya, sehingga berkinerja lebih baik.

Pemerintah memberikan insentif (honor atau tali asih) sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas pendamping sosial, yang besarnya bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,-. Sebanyak tujuh orang memperoleh insentif dengan jenis honor yang besarnya Rp. 2.000.000,- dan tiga orang dengan jenis tali asih yang besarnya antara Rp.250.000,— Rp. 300.000,-. Meskipun ada perbedaan yang signifikan dari sisi besarnya insentif yang diterima, namun mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pendamping sosial. Selain menerima insentif, sebagian pendamping sosial juga menerima honor dari sumber lain. Sebanyak tujuh orang menerima honor dari kegiatan lain, tetapi honor tersebut diterima per kegiatan sebesar Rp.500.000,-.

Honorarium memang memiliki korelasi yang lemah, karena banyak pendamping sosial yang bekerja karena panggilan kemanusiaan. Meskipun demikian, mereka memiliki daftar kebutuhan hidup yang memerlukan pemenuhan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi disebabkan pendapatannya rendah, dapat mengganggu kinerja pendamping sosial.

Dari sisi peralatan kerja, sebanyak enam orang memperoleh sarana kerja. Dua orang dalam bentuk alat tulis kantor/ buku catatan, satu orang dalam bentuk sepeda motor dan dua orang dalam bentuk laptop. Sebagaimana dikemukakan di atas, mereka tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendamping sosial, meskipun sarana prasarana kerja belum mendukung pelaksanaan tugas. Misalnya, tidak memiliki

komputer sendiri untuk pengolahan data, pembuatan laporan dan sosialisasi; alat tulis kantor diadakan sendiri, dan sarana transportasi sendiri.

Peralatan kerja bagi pendamping sosial diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas mereka. Ketika sarana kerja jenis dan jumlahnya terbatas, tentu pelaksanaan tugas mereka menjadi tidak optimal.

3. Kegiatan dan Peran Pendamping

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial, merupakan aspek yang menjadi dasar untuk mengetahui kinerja pendamping sosial. Kegiatan pendamping sosial di Kota Tarakan dibedakan menjadi kegiatan teknis dan kegiatan administratif.

a. Kegiatan Teknis

Pendampingan sosial pada kegiatan teknis meliputi: preventif, kuratif/rehabilitatif, dan pengembangan (Mardjuki, 2017; Susantyo.e.t.al, 2018). Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Preventif

Kegiatan preventif adalah kegiatan dalam upaya untuk mencegah sebelum permasalahan terjadi. Kegiatan preventif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu (1) penyuluhan sosial kepada masyarakat, (2) melaporkan kepada dinas sosial apabila ada calon KPM, (3) dan memberikan edukasi, sosialisasi dan motivasi kepada KPM.

2) Kuratif/Rehabilitatif

Kegiatan rehabilitatif atau kuratif adalah kegiatan dalam

upaya memecahkan, mengatasi, memperbaiki dan memulihkan suatu kondisi, dari bermasalah menuju keberfungsian sosial. Kegiatan kuratif/rehabilitatif yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu a. mengatasi anak putus sekolah, yang dilakukan dengan cara mendaftarkan kembali anak tersebut pada tahun ajaran baru, atau memasukkan ke program pendidikan kejar paket A, B atau C; b. membantu KPM memperoleh pelayanan kesehatan, yang dilakukan dengan cara membantu proses Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS atau Jamkesda; c. memfasilitasi anak KPM yang berhadapan dengan hukum, yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada anak dan keluarganya selama proses peradilan, d. memberikan teguran keras kepada KPM yang melanggar komitmen, yang dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan atau tertulis ketika KPM tidak berkomitmen terhadap program; e. memberikan motivasi kepada KPM, yang dilakukan dengan cara dialog dan konsultasi secara berkala, dan f. memberikan konseling (mengatasi tekanan psikologis) kepada KPM yang mengalami masalah psikosial

3) Pengembangan

Kegiatan pengembangan adalah kegiatan dalam upaya menggali dan mengoptimalkan sumber pada diri KPM, sehingga mereka menjadi berdaya. Kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan, yaitu a. mendampingi KPM dalam mengelola usaha

ekonomi, dilakukan dengan cara mengajari pembukuan sederhana, membantu merencanakan usaha, dan pemanfaatan hasil usaha ; b. memberikan penyuluhan dan motivasi KPM, dilakukan dengan cara diskusi dalam pertemuan kelompok berkala dan c. sosialisasi program pengembangan melalui *Family Development Session (FDS)*, dilakukan dengan cara diskusi dalam pertemuan kelompok kecil, dan memanfaatkan media sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial tersebut terkait dengan pengetahuan teoretis maupun praktis, yaitu: *intellectual skill*, *managerial skill* dan *intervention skill*. Hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan, bahwa pendamping sosial sudah memiliki pengetahuan intervensi sosial yang cukup memadai, baik secara teoretis maupun praktis. Pengetahuan pendamping sosial secara teoretis maupun teknis tersebut tercermin pada kompetensi mereka dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi pendamping sosial dapat dikatakan juga cukup memadai dibandingkan dengan tugas-tugas, beban kerja dan dinamika masyarakat.

Kompetensi akan memengaruhi kerja seorang pendamping sosial. Pendamping sosial yang memiliki kompetensi yang baik, maka kinerjanya akan tinggi, atau sebaliknya. Pendamping sosial dapat melaksanakan perannya dengan baik (kinerja tinggi), karena memiliki kompetensi yang memadai. Pada kerangka ini, maka kompetensi pendamping sosial merupakan faktor penting dan menentukan pelaksanaan tugas mereka, dan hasil yang akan dicapai pada program kesejahteraan sosial (lihat Susantyo.et.al, 2018; Marjuki, 2017;

Bagia dan Susila, 2016; Budianto, 2013; Pratama; Mulyadi, 2010).

b. Kegiatan administratif

Selain kegiatan teknis, pendamping sosial juga mengerjakan tugas/kegiatan administratif. Kegiatan administratif yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan. Pelaporan meliputi: jenis laporan, cara penyampaian laporan, pengguna laporan, frekuensi laporan, umpan balik laporan dan sanksi apabila laporan tidak dibuat.

1) Jenis laporan

Pendamping sosial membuat laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil (*ouput* dan *outcome*) kegiatan pendampingan sosial. Laporan dibuat secara tertulis yang seringkali melampaui waktu yang telah ditentukan.

2) Cara penyampaian laporan

Laporan yang dibuat oleh pendamping sosial disampaikan secara langsung, dan secara tidak langsung atau melalui email.

3) Pengguna laporan

Pengguna laporan kegiatan pendampingan sosial adalah: (1) koordinator pendamping Kota Tarakan, (2) Korwil Provinsi Kaltara, (3) Dinsos dan PM Kota Tarakan, (4) Dinas Sosial Provinsi Kaltara, dan (5) Instansi terkait.

4) Frekuensi pelaporan

Pada program PKH, laporan dibuat setiap bulan untuk mengetahui perkembangan KPM. Sedangkan pada program ASODK, ASLUT, PKSA dan FM yang lain dibuat sesuai kebutuhan.

5) Pemanfaatan laporan

Pemanfaatan laporan yang dibuat oleh pendamping sosial adalah honor atau taliasih yang diterima oleh pendamping. Artinya, pendamping sosial menerima honor atau tali asih setelah mengirimkan laporannya. Sedangkan umpan balik untuk kebijakan hingga saat ini belum ada.

6) Sanksi bila tidak membuat laporan

Apabila pendamping sosial tidak membuat laporan atau laporan terlambat, maka sanksinya mereka tidak menerima honor atau tali-asih. Atau penyaluran honor dan taliasih mereka terlambat diterima.

Pada manajemen modern, pelaporan merupakan salah komponen penting dari pengendalian; komponen lain adalah supervisi, monitoring dan evaluasi. Sehubungan dengan itu, maka pelaporan di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan apapun tidak dapat diabaikan. Laporan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, alat untuk menyampaikan informasi, alat pengawasan, bahan penilaian dan bahan pengambilan keputusan (Bobsusanto, 2016).

Banyak orang yang masih menganggap, bahwa laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan itu tidak penting. Padahal, sebuah laporan memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, yaitu bahan penyusunan kebijakan dan arahan pimpinan, bahan penyusunan rencana berikutnya, mengetahui perkembangan dan peningkatan kegiatan, serta data sejarah perkembangan sebuah organisasi (Gunadi, 2013).

Laporan yang baik tidak dilihat dari ketebalan atau jumlah halamannya. Laporan yang tebal tidak menjamin

kelengkapan isi dan mudah dipahami oleh pihak pengguna. Laporan yang baik, menurut Bobsusanto (2016), memiliki ciri: ringkas, lengkap, logis dan sistematis.

Berdasarkan temuan lapangan, pendamping sosial telah menyusun laporan setiap bulan. Namun demikian, laporan yang dibuat pendamping tersebut masih sebatas bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan. Selain itu, masih terkesan laporan yang dibuat sebagai persyaratan untuk pencairan honor atau taliasih. Hal ini dapat dicermati dari tidak adanya umpan balik atas laporan yang dibuat oleh pendamping sosial. Jika demikian makalaporan pendamping sosial masih terbatas pada manfaat administratif program.

Adapun peran yang dimainkan oleh pendamping sosial dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator (Susantyo.et.al, 2018; Mardjuki, 2017; Suharto, 2005). Peran-peran yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Kota Tarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjalin sumber

Peran pendamping sosial sebagai penjalin sumber dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memberi informasi kepada KPM yang berhubungan dengan kebijakan dan program PKH, (2) Konsultasi dan menerima saran KPM, (3) menjalinkan sumber dari Kementerian Sosial kepada KPM, (4) menjalinkan KPM dengan lingkungan sosial, dan (5) menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut pelayanan sosial bagi KPM.

b. Motivator

Peran pendamping sosial sebagai motivator dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memotivasi KPM agar memenuhi kewajiban dan komitmen terkait dengan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya, (2) memberi semangat agar KPM semangat mengelola usahanya, (3) memberikan edukasi dan memantau KPM, dan (4) memotivasi klien aktif mengikuti kegiatan agama/spiritual.

c. Pendidik

Peran pendamping sosial sebagai pendidik dilaksanakan melalui kegiatan: (1) memberikan bimbingan spiritualitas kepada KPM, (2) FDS merupakan wadah pengembangan pengetahuan peserta PKH di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, (3) memberikan bimbingan pengelolaan pendapatan, pembagian hasil usaha dan pembukuan, dan (4) mengarahkan KPM berpikir positif, terarah dan lebih baik, dan megutamakan kepentingan anak.

d. Fasilitator

Peran sebagai pendamping sosial sebagai fasilitator dilaksanakan melalui kegiatan: (1) melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan fasilitasi kepada KPM untuk mendapatkan bantuan, (2) memfasilitasi layanan bagi KPM, dan (3) melakukan pendekatan ke instansi terkait berhubungan dengan pemasaran produk.

Berdasarkan informasi dari pendamping sosial terkait dengan empat peran, menunjukkan bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Bergai peran tersebut dirasakan manfaatnya oleh KPM, seperti dalam mengelola usaha kelompok, mencairkan bantuan sosial, mengaskes pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mengakses informasi yang diperlukan.

Pengetahuan terkait dengan peran pendamping sosial ini penting, sebagai dasar dalam melakukan intervensi sosial. Oleh karena itu, terkait dengan peran pendamping sosial ini, diperlukan pemahaman yang tepat. Apabila pendamping sosial memiliki pemahaman yang tepat, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peran ketika mendampingi KPM.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Ditegaskan, bahwa eksistensi pendamping sosial sebagai ujung tombak Dinsos dan PM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun demikian Dinsos dan PM mengakui, bahwa masih ada permasalahan yang berhubungan dengan pemahaman pelaksanaan pendampingan sosial. Sehubungan dengan itu, Dinsos dan PM Kota Tarakan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendamping sosial. Hasil dari monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan kegiatan pendampingan sosial di masa akan datang.

Eksistensi pendamping sosial juga diakui dan diterima oleh LKS yang memanfaatkan tenaga pendamping sosial. Menurut pengelola LKS di Kota Tarakan, keberadaan pendamping sosial sangat membantu pelaksanaan tugas LKS. Permasalahan yang dihadapi oleh LKS, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan KPM (anak) dapat diatasi dengan bantuan dari pendamping sosial. Selain terkait dengan pemenuhan kebutuhan, pendamping sosial juga membantu dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan persoalan hukum

(pada anak yang berhadapan dengan hukum) yang ada di LKS.

Kemudian, menurut KPM bahwa pendamping sosial sudah dikenal dengan baik. Para KPM sering bertemu dengan pendamping, dan keberadaan pendamping sosial tersebut telah memberikan manfaat bagi mereka. Pendamping sosial memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi KPM terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial. Bagi para KPM, keberadaan pendamping sosial sebagai sumber informasi dan tempat mengadukan permasalahan yang dihadapi. Ditegaskan oleh seorang KPM, bahwa pendamping sosial telah memberikan waktu dan tenaganya, serta membagi ilmunya dengan sabar kepada PKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendamping sosial telah melaksanakan peran dengan baik. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seorang pendamping sosial sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat pendamping sosial bagi KPM, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan KPM kepadanya. Pada penelitian ini, ada 4 (empat) peran pendamping sosial, yaitu penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator.

Ketika peran pendamping sosial dapat dilaksanakan dengan baik, maka program dan kegiatan yang menjadi arena praktik pendamping sosial akan mencapai tujuan secara optimal. Sehubungan dengan, diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama berkaitan dengan pengembangan kapasitas pendamping sosial (lihat Rahmawati, 2017; Rohman, 2017; Dirgantari, 2016; Zufri, 2014).

4. Jejaring/Kemitraan dalam Pendampingan

Pendamping sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu, maka mereka memerlukan jejaring / kemitraan dengan berbagai sistem sumber.

Menurut Gould dan Penley (Gibson, Hardy and Buckley, 2013), jejaring adalah praktik mengembangkan sistem di dalam dan di luar organisasi, sehingga memberikan informasi yang relevan dan dukungan untuk pelaksanaan tugas/ pengembangan karier. Definisi dalam perspektif yang lebih personal, dikemukakan oleh Michael dan Yukl (Gibson, Hardy and Buckley, 2013) bahwa jejaring adalah perilaku yang dirancang untuk membangun hubungan interpersonal informal dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Jejaringan tersebut melibatkan pertukaran perasaan (menyukai, persahabatan), informasi, manfaat, dan pengaruh.

Jejaring / kemitraan pendamping sosial dalam pelaksanaan tugas di Kota Tarakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Siapa mitra kerja

Pada pelaksanaan pendampingan, pendamping sosial membangun jejaring/ kemitraan dengan berbagai pihak. Pada program PKH jejaring yang dibangun pendamping sosial dengan: (1) kecamatan, kelurahan, UPT kesehatan, UPT pendidikan dan RT, (2) BNI dan Badan Urusan Logistik (Bulog), (3) *service provider*, pilar-pilar kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, Pekerja Sosial), dan (4) Dinsos dan PPM Kota Tarakan. Sedangkan pada program KUBE, PKSA, ASLUT dan ASODKB, pendamping sosial membangun jejaring dengan Dinsos dan PM Kota Tarakan,

pemerintah kecamatan, kelurahan, RT dan dasa wisma (khusus KUBE).

b. Manfaat jejaring

Manfaat jejaring adalah dukungan pada pelaksanaan pendampingan sosial, seperti: (1) partisipasi masyarakat dalam memantau KPM, (2) fasilitasi pada kegiatan pendampingan, dan (3) pelayanan yang baik kepada KPM..

Pada setiap program dan kegiatan, termasuk pendampingan sosial - jejaring merupakan faktor penting dan menentukan keberhasilan. Hal ini didasarkan pada fenomena empirik, bahwa permasalahan sosial di tataran praksis bersifat multi-dimensional, yang memerlukan pemahaman multi-perspektif dan multi-pendekatan. Meskipun jejaring bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program, tetapi menjadi keniscayaan untuk mencapai hasil yang optimal tanpa membangun jejaring (lihat Harisman,2017; Utami, Dinar dan Sumantri, 2016; Sofyan, 2006).

5. Permasalahan dalam Pendampingan

Pendamping sosial masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang dilihat dari: jumlah klien, jenis masalah, alokasi waktu, dan uraian tugas, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah dan data klien

Pada program PKH, seorang pendamping mendampingi 159 – 299 orang KPM. Pada program KUBE mendampingi 90 orang (9 KUBE), pada program ASLUT mendampingi 10 orang, pada program ASODKB mendampingi 7 (tujuh) orang dan pada program PKSA mendampingi 37 orang.

Permasalahan berikutnya adalah masih ada data KPM yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masih ada KPM yang tidak memenuhi persyaratan

menerima bantuan, atau sebaliknya. Berikutnya, penggantian KPM yang meninggal, pindah domisili dan graduasi yang belum terealisasi sesuai usulan.

b. Jenis masalah

Jenis masalah terkait dengan jumlah KPM dirasakan pada program PKH. Menurut mereka, idealnya seorang pendamping mendampingi KPM 150-200 orang. Sementara itu untuk program yang lain masih dipandang rasional. Masalah berikutnya adalah data yang tidak valid, kecemburuan sosial antara KPM dengan masyarakat di sekitarnya, KPM berusia lanjut sehingga seringkali terjadi miskomunikasi. Selain itu, pendamping sosial seringkali mendapat tugas tambahan di luar tugas pokok dari Dinsos dan PM Kota Tarakan maupun dari Dinas Sosial Provinsi Kaltara. Kemudian, bagi pendamping sosial program PKH, perluasan sasaran program PKH pada program ASLUT dan ASODKB, dirasakan menambah beban kerja. Mereka dituntut mendampingi lanjut usia dan orang dengan kecacatan berat, di mana mereka tidak memiliki keterampilan pendamping sosial yang memadai.

c. Alokasi Waktu

Pada program PKH, pendamping sosial melaksanakan pendampingan sosial penuh waktu. Artinya, seorang pendamping sosial PKH seluruh waktunya untuk mendampingi KPM penerima PKH saja. Sedangkan pada program yang lain dilaksanakan paruh waktu. Di mana pendamping sosial masih bisa melaksanakan aktivitas lain di luar tugasnya sebagai pendamping sosial.

d. Beban Kerja

Pendamping sosial melaksanakan tugas, baik yang bersifat administratif maupun

teknis di lapangan. Mereka membuat surat menyurat dan laporan tertulis sesuai kebutuhan. Kemudian, melaksanakan kegiatan teknis, seperti penyuluhan, koordinasi, validasi dan verifikasi data, penyaluran bantuan, kunjungan ke KPM, pertemuan kelompok, melakukan FDS, konseling dan memfasilitasi KPM pada sistem sumber. Tugas-tugas tersebut cukup menguras waktu dan tenaga pendamping sosial, sehingga dirasakan menjadi beban kerja.

e. Sarana prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja masih terbatas (transportasi, peralatan kantor, peralatan lapangan). Pendamping sosial telah mengkomunikasikan permasalahan tersebut ke Dinasos dan PM Kota Tarakan dan Kementerian Sosial. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada respon dari instansi tersebut.

f. Kapasitas pendamping

Dinamika dan perkembangan permasalahan semakin kompleks serta beban kerja belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi pendamping, terutama kompetensi teknis pendampingan. Sehubungan dengan itu, pendamping sosial merasa masih memerlukan pelatihan dan bimbingan lanjutan.

Permasalahan yang bersumber dari beban kerja yang tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai, akan memengaruhi kinerja seseorang. Tugas-tugas yang melampaui kemampuan dan kekuasaan seseorang, akan memengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang, dan mengakibatkan seseorang tidak dapat mencapai kinerja yang baik atau sesuai tujuan yang diharapkan. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi

kinerja seseorang, memberikan pekerjaan atau tugas yang melebihi kapasitas seseorang, bukan langkah yang tepat. Beban kerja berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas seseorang (lihat Adityawarman, Sanim dan Sinaga, 2015; Fajriani dan Septiari, 2016; Budianto, 2013).

KESIMPULAN

Kinerja pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan di Kota Tarakan pada kategori sedang (*moderate*). Hal ini didasarkan penilaian pada: pelaksanaan kegiatan (preventif, kuratif/rehabilitatif dan pengembangan) dan peranan (penjalin sumber, motivator, pendidik dan fasilitator); pengembangan jejaringan /kemitraan dengan sistem sumber; dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan pendampingan sosial.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka disarankan:

1. Kepada Kementerian Sosial

- a. Data calon KPM terus di-*update* dengan melibatkan instansi sosial provinsi maupun kabupaten/kota dan pendamping sosial. Persoalan data yang tidak valid saat ini, telah memengaruhi pelaksanaan tugas dan peran pendamping sosial ketika berhadapan dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Verifikasi dan validasi data calon KPM perlu melibatkan instansi sosial dan pendamping sosial.
- b. Rekrutmen pendamping sosial memperhatikan populasi kelompok sasaran (calon KPM), sehingga diperoleh rasio antara pendamping dan KPM yang rasional.

Rasio antara pendamping sosial dengan

KPM adalah seorang pendamping mendampingi 10 orang pada program ASODKB, ASLUT dan PKSA. Untuk KUBE seorang pendamping mendampingi 20-30 orang, dan pada PKH seorang pendamping mendampingi 150 – 200 orang.

- c. Pendamping sosial belum cukup dengan pelatihan yang diikuti pada ketika di awal tugasnya. Persoalan di lapangan ternyata lebih dinamis, yang menuntut kemampuan dan keterampilan yang lebih besar. Sehubungan dengan itu, diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis lanjutan bagi pendamping sosial. Selain itu, pendamping sosial memerlukan pelatihan/bimbingan teknis mengenai advokasi sosial.
 - d. Pendamping sosial berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga memerlukan pengakuan dari masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan atribut (pakaian kerja) sebagai bukti legalitasnya di tengah masyarakat.
 - e. Besarnya insentif (honor, taliasih) bagi para pendamping perlu diperhitungkan kembali, sehingga kesenjangan insentif antara pendamping sosial pada program berbeda, tidak terlalu jauh.
 - f. Memasukkan kewenangan instansi sosial kabupaten/kota dan provinsi di dalam panduan pelaksanaan program, terkait dengan pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tugas pendamping sosial.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi pendamping sosial, sekurang-kurangnya setahun sekali.
- ### 2. Kepada Dinsos dan PM Kota Tarakan
- a. Melakukan koordinasi validasi dan verifikasi data calon KPM.
 - b. Pengadaan sarana kerja dan insentif untuk mendukung pelaksanaan tugas

- pendampingan sosial.
- c. Melakukan bimbingan teknis kepada pendamping sosial.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran dan fungsi pendamping sosial, sekurang-kurangnya setahun sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terimakasih kepada Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan beserta seluruh staf, pendamping sosial yang telah memberikan dukungan dan kesediaan berdiskusi dan memberikan informasi, dan rekan-rekan tim penelitian di Puslibtangeos.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman.Y, Sanim.B dan Sinaga.B.M, (2015), Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot /Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol VI, No 1, April 2015.
- Amin.A.R, (2010), Analisis Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, (2015), Kota Tarakan dalam Angka, BPS, Kota Tarakan.
- Berghe.J.V, (2011), Job Satisfaction and Job Performance at the Work Place, Thesis, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28669/Vanden_Berghe_Jae.pdf [20/6/2018].
- Bobsusanto, (2016), Pengertian Laporan, Fungsi Laporan, dan Manfaat Laporan <http://www.spengetahuan.com/2016/09/pengertian-laporan-fungsi-laporan-dan-manfaat-laporan.html> [25/3/2018].
- Budianto.E, (2013), Pengaruh Beban Kerja dan Kapasitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Manggis Rotan Jepara, Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Dirgantari.A.I, (2016), Efektivitas Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Dobrin,C.O, Popescu,G.N, Popescu, V.A & Popescu.C.R, (2012), The Concept Of Performance In Business Organizations – Case Study On The Employee Performance In Romanian Business Organizations, Proceedings Of The 6th International Management Conference “Approaches In Organisational Management” 15-16 November 2012, Bucharest, Romania.
- Fogaca.N, Rego,M.C.B, Melo, M.C.C, Armond,L.P, Coelho,F.A, (2018), Job Performance Analysis: Scientific Studies in the Main Journals of Management and Psychology from 2006 to 2015, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/piq.21248. Volume 30, Number 4 / 2018.
- Gibson.C, Hardy.J.H & Buckley.M.R, (2013), Understanding the Role of Networking In Organizations, *Career Development International*, Vol. 19 No. 2, 2014 pp. 146-161, DOI: 10.1108/CDI-09-2013-0111.

- Gunadi, G, 2013, Pengertian, Tujuan, Manfaat, Jenis dan Ciri dari Laporan, <http://bald-gugungondrong.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-tujuan-manfaat-jenis-dan.html> [25/2/2018].
- Harisman.K, (2017), Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usahatani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut), *Jurnak Istek – Uin Sunan Gunungjati*, Edisi Mei 2017 Volume X No. 1.
- Hendrikus.M.B, (2016), Impelementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usah Bersama di Kecamatan Nunukan, Thesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Huda.N, Anggraini, R dan Sutiyono.I.R, (2013), Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), Universitas Jember, [http://:repository.unej.ac.id/bitstream/andle/123456789/58825/Nurul%20Huda.pdf?...1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/andle/123456789/58825/Nurul%20Huda.pdf?...1) [5/3/2018].
- Irmayani.et.al, (2016), Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial di Empat Provinsi, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Marjuki (2017). Optimalisasi Peran Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Pemanfaatan Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial. Disampaikan pada saat diskusi penyusunan *policy memo* Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, 30 Januari 2018 Di Salemba Raya No. 28, Jakarta.
- Mulyadi.H, (2010) Pengaruh Motivasi dan Kompetensi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Galamedia Bandung Perkasa, *Manajerial Vol. 9, No. 17, Juli 2010: 97 – 111*.
- Ningrum.D.A, (2017), Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan Di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung, http://eprints.uny.ac.id/52277/1/skripsi_diah%20ayu%20ningrum_13102241040.pdf [20/4/2018].
- Pratama.P.A, Bagia.I.W, Agus.G.P, And Susila.J, (2016) Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompetensi Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan E-Journal, Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)
- Rahmawati.E, (2017), Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah, Skripsi, Jurusan Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Rohman.M.F, (2017), Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Triwidadi, Pajangan, bantul, Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Sofyan.A, (2006) Strategi Kemitraan dalam Saluran Distribusi Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis (Studi Empiris Kemitraan Ternak Broiler Di Semarang, Kudus dan

- Salatiga), Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Suharto.E, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Suryani dan Purnama.A, (2017), Peran Pendamping KUBE-FM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017, 67-76.
- Susantyo.B.et.al, (2018), *Optimalisasi Peran Pendamping Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Puslitbangkesos.
- Utami.A, Dinar dan Sumantri.K (2016) Pengaruh Pola Kemitraan Terhadap Pendapatan Petani Tebu (Suatu Kasus Di PT. PG Rajawali II, Unit PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat), *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Volume 4 Nomor 1 Juli 2016.
- Widyakusuma.N, (2013), Peran Pendamping Dalam Program Pendampingan Dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga: Studi Tentang Pendamping Di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Wulandari.D.N, (2017), Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai), *JOM Fisip* Vol. 4 No. 1 – Februari 2017.
- Zufri.O.R, (2014), Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur), Skripsi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.